

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai Negara berkembang Indonesia terus mengalami perkembangan dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang pembangunan. Pembangunan menandakan majunya suatu Negara, kota, maupun daerah. Hal ini dikarenakan kebutuhan perkembangan kota yang di dasari dengan pertumbuhan penduduk beserta aktivitas dan kegiatan yang dilakukannya.

Salah satu kota di Indonesia yang saat ini terus mengalami perkembangan adalah Jakarta yang merupakan ibu kota Negara. Jakarta memiliki luas sekitar 661,52 km² (lautan: 6.977,5 km²), dengan penduduk berjumlah 10.187.595 jiwa (2011). Wilayah metropolitan Jakarta (Jabotabek) yang berpenduduk sekitar 28 juta jiwa, merupakan metropolitan terbesar di Asia Tenggara atau urutan kedua di dunia. Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN.

Seiring dengan meningkatnya perkembangan zaman, maka meningkat pula segala kegiatan manusia untuk memenuhi keperluannya. Salah satu diantaranya adalah kebutuhan angkutan. Kini semakin mudah orang berpergian dari satu tempat ketempat lainnya dengan cepat. Hampir tidak ada lagi tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh hadirnya alat-alat angkutan yang semakin meningkat. Pada gilirannya keadaan ini sangat menunjang pertumbuhan pembangunan khususnya dibidang perekonomian.

Namun demikian tidak dapat dihindari dampak dari kemajuan tersebut yakni timbulnya kecelakaan-kecelakaan yang diakibatkan kendaraan bermotor, penumpang umum serta kendaraan bermotor lainnya. Keadaan ini tentu saja sangat memprihatinkan kita semua. Berangkat dari situasi inilah, maka pemerintah berupaya melindungi masyarakat dengan jalan memberikan jaminan sosial berupa Dana Santunan kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan penumpang umum dan lalu lintas jalan.

PT. Jasa Raharja (Persero) yang berdiri pada sejak 1 Januari 1961, adalah perusahaan asuransi sosial yang oleh pemerintah diberi tugas sebagai pelaksana UU No. 33 tahun 1964 dan UU No. 34 tahun 1964, yang sifatnya wajib. Pelaksanaan pemberian jaminan tersebut tertuang dalam undang-undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang dengan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1965 dan undang-undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana kecelakaan Lalu Lintas Jalan dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1965 sebagai ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.¹

Jaminan social dapat diberikan melalui system asuransi social yang didanai oleh premi asuransi maupun melalui bantuan social yang dananya diperoleh dari pendapatan pajak. Asuransi social ditetapkan berdasarkan *insurance expertise*. Pemberian manfaat asuransi diperhitungkan berdasarkan premi asuransi medis dan asuransi kecelakaan adalah dua tipe asuransi social yang sangat luas dikenal. Jasa Raharja merupakan salah satu penyelenggara dalam hal ini memberikan pelayanan jaminan terhadap resiko kecelakaan, dalam hal ini pelayanan terhadap masyarakat perlu mendapatkan pemahaman dan informasi yang jelas terutama pihak tertanggung.

Di dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya Asuransi Sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, hal ini ditegaskan didalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor

¹ <http://www.linkedin.com/company/pt-jasa-raharja-persero> diakses pada tanggal 24 April 2014

2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dimana dijelaskan bahwa, “Program Asuransi Sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara”. Mengenai Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dalam hal ini pemerintah menunjuk PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai Perusahaan Negara yang menyelenggarakan Program Asuransi Sosial tersebut.²

Perusahaan yang mempunyai visi menjadi perusahaan terkemuka di bidang Asuransi dengan mengutamakan penyelenggaraan program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib sejalan dengan kebutuhan masyarakat ini ingin terus memberikan yang terbaik dengan cara melakukan pembangunan kembali karena bangunan ini sudah lama, selain itu untuk melengkapi fasilitas para pegawainya dikarenakan gedung yang ada saat ini sudah tidak memenuhi kapasitas dan juga adanya aturan dari Kementerian BUMN. Selain itu perancangan kantor pusat Jasa Raharja ini sangatlah penting karena bertujuan untuk mempermudah mengkoordinasi anak perusahaan Jasa Raharja yaitu Jasa Raharja Putera, untuk itu juga perlu adanya kantor sewa sebagai wadah anak perusahaan dan juga untuk perusahaan-perusahaan lain yang ingin menyewanya.

1.2. Tujuan dan Sasaran

1.2.1. Tujuan

Memperoleh suatu judul tugas akhir yang jelas dan layak, dengan suatu penekanan desain yang spesifik sesuai karakter/keunggulan judul dan citra yang dikehendaki atas judul yang diajukan tersebut. Sedangkan untuk tujuan secara substansial, judul ini adalah untuk menggali dan mengetahui lebih dalam permasalahan yang berkaitan dengan Kantor Pusat Jasa Raharja sehingga dapat menampung aktivitas kantor cabang dan anak perusahaan.

1.2.2. Sasaran

Tersusunnya usulan langkah-langkah proses (dasar) perencanaan dan perancangan Kantor Pusat Jasa Raharja melalui aspek-aspek panduan perancangan (*design guide lines aspect*) dan alur pikir proses penyusunan LP3A untuk menyusun Desain Grafis yang akan dikerjakan.

1.3. Manfaat

1.3.1. Subjektif

Secara Subjektif, manfaat pengajuan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti Tugas Akhir di Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang. Sebagai pegangan dan acuan selanjutnya, dalam penyusunan eksplorasi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Tugas Akhir. Adapun manfaat secara obyektif dari LP3A ini dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir.

1.3.2. Objektif

Secara obyektif dari pengajuan ini dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir.

1.4. Ruang Lingkup

Lingkup pembahasan perencanaan dan perancangan Kantor Pusat Jasa Raharja ini dititikberatkan pada hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu arsitektur, seperti aspek fungsional, teknis, kinerja, kontekstual dan arsitektural. Sedangkan data, informasi dan permasalahan di luar bidang arsitektur sejauh masih melatarbelakangi, mendasari dan berkaitan dengan faktor-faktor perencanaan fisik dibahas secara umum dengan berdasarkan masterplan yang ada serta asumsi

² http://id.wikipedia.org/wiki/Jasa_Raharja diakses pada tanggal 24 April 2014

rasional dan logis sebagai informasi pendukung, antara lain mengenai tinjauan bangunan perkantoran dan konteks lingkungan dan budaya setempat sebagai acuan perancangan *image* DKI Jakarta.

1.5. Metode Pembahasan

Metode pembahasan yang digunakan adalah metode deskriptif dokumentatif yang dilakukan dengan mengumpulkan data, memberikan gambaran segala permasalahan dan keadaan yang ada kemudian dilakukan analisa melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif, untuk mendapatkan hasil berupa kesimpulan yang digunakan dalam penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur. Metoda pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi lapangan, dilakukan sebagai pengamatan langsung terhadap objek perencanaan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan data fisik dan non Kantor Pusat Jasa Raharja, secara spasial, lingkup pembahasan mencakup wilayah DKI Jakarta
2. Wawancara, dilakukan dengan pihak-pihak terkait, guna melengkapi data-datayang diperoleh dari observasi lapangan.
3. Studi pustaka, dilakukan untuk memperoleh data-data literatur.

1.6. Sistematika Pembahasan

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang gambaran umum tentang Kantor Pusat Jasa Raharja berupa latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat pembahasan, lingkup pembahasan, metoda pembahasan, sistematika pembahasan dan alur pikir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang substansi data-data tentang Kantor Pusat Jasa Raharja berupa tinjauan umum Kantor Jasa Raharja dan tinjauan tematik/penekanan desain.

BAB III TINJAUAN LOKASI

Berisi tentang data-data lokasi proyek Kantor Pusat Jasa Raharja berupa tinjauan umum lokasi dan kebijakan tata ruang wilayah.

BAB IV KESIMPULAN, BATASAN, DAN ANGGAPAN

Berisi tentang kesimpulan, batasan dan anggapan dari bab-bab sebelumnya yang akan digunakan sebagai acuan perencanaan dan perancangan Kantor Pusat Jasa Raharja di Jakarta dengan penekanan desain Post Modern Architecture.

BAB V PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN PROYEK

Berisi tentang aspek-aspek perencanaan seperti aspek fungsional, aspek kontekstual, aspek kinerja, aspek teknis Kantor Pusat Jasa Raharja beserta fasilitas pelengkapnnya, serta arsitektur Post Modern sebagai penekanan desain.

BAB VI PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN PROYEK

Berisi tentang konsep dan program perencanaan dan perancangan Kantor Pusat Jasa Rajarja di Jakarta dan fasilitas pelengkap secara garis besar, serta Post Modern Architecture sebagai penekanan desainnya yang akan digunakan sebagai acuan dalam tahap desain grafis.

1.7. Alur Pikir

